



GAPKI

NEWS

**B50 PERLU KEBIJAKAN
YANG ADAPTIF DAN FLEKSIBEL**



Tantangan Besar 2026

Pembaca yang budiman,

Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa karena *GAPKI News* edisi Desember 2025 hadir tepat waktu untuk menghampiri pembaca. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus GAPKI Pusat dan GAPKI Cabang yang telah berbagi informasi.

Tahun 2025 tidak lagi pergi dan kita memasuki 2026. Bagi industri sawit, pergantian tahun ini bukan sekadar pergantian angka. Ia merupakan momentum penting untuk menyiapkan strategi dan langkah berikutnya. Apalagi pemerintah akan menerapkan kebijakan B50. Ini langkah besar sekaligus tantangan bagi industri sawit di tengah stagnansi produksi.

Setiap kebijakan tentu membawa konsekuensi. Begitu juga dengan percepatan B50 sebagai tonggak menuju kedaulatan energi. Karena itu, *mandatory* B50 diharapkan meningkatkan daya saing sawit dan mempertimbangkan faktor keseimbangan antara kapasitas produksi dan konsumsi. Kebijakan yang adaptif dan fleksibel sangat diperlukan dalam menjalankan *mandatory* B50 agar keseimbangan semua faktor terjaga.

Hasil kajian Pranata UI tentang *mandatory* B50 dan respon analis serta pelaku pasar minyak nabati global yang dipaparkan dalam konferensi IPOC 2025 menjadi laporan utama *GAPKI News* edisi Desember 2025 ini. Proyeksi harga CPO tahun 2026 di tengah implementasi B50 juga menjadi bagian menarik mengkaji posisi minyak sawit di pasar minyak nabati dunia.

Laporan lainnya tentang transformasi digital, pemberdayaan perempuan pekerja di sektor sawit, hingga kegiatan GAPKI Cabang menjadi bagian dalam penerbitan *GAPKI News* edisi Desember 2026. Semoga sajian edisi ini semakin memperkuat peran dan posisi GAPKI di pasar sawit domestik dan global. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat membaca. ■

Salam,
Redaksi GAPKI News

GAPKI News

Media Komunikasi dan
Informasi Anggota GAPKI

PENERBIT
GAPKI Pusat

PEMBINA
Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

PENGARAH
Mukti Sardjono

TIM AHLI
Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

PENANGGUNG JAWAB
Bandung Sahari

Dewan Redaksi
Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Mochamad Husni
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

ALAMAT
Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871
gapki@gapki.id | gapkipusat@
yahoo.com



Membangun Relasi, Memperkuat Komunikasi.....	9
--	---

Salam Redaksi.....	2
Daftar Isi.....	3
Stok Minyak Sawit Pada Akhir September 2,59 Juta Ton.....	4
GAPKI Apresiasi Inovasi ITS di Sektor Sawit.....	5
Antisipasi Implementasi <i>Mandatory</i> B50.....	6,7
B50 Perlu Kebijakan yang Adaptif dan Fleksibel.....	8
Tiga Tantangan Industri Sawit Masa Depan.....	10,11
Tahun 2026, Harga Minyak Sawit Tetap Tinggi.....	12
Pengendalian Karhutla Tidak Bisa Parsial.....	13
Memperkuat Peran Perempuan Menuju Sawit Berkelanjutan.....	14
GAPKI Perluas Pasar Ekspor Sawit ke Angola.....	15
Industri Sawit Didorong Percepat Transformasi Digital.....	16



Penetrasi Pasar Afrika Melalui Kemitraan Dagang Sawit.....	17
---	----



Mekanisme Perdagangan Karbon Harus Sempel.....	18
---	----

GAPKI Dukung Penguatan Petani Sawit di Daerah 3T.....	19
GAPKI Aceh Didorong Tingkatkan Nilai Tambah Produk Sawit.....	20
GAPKI Dorong Penguatan Sektor Hulu Industri Sawit.....	21
GAPKI Sulawesi Sahkan 5 Program Kerja 2026.....	22
Relasi Perusahaan-Pekerja Sebagai Investasi Jangka Panjang.....	23

STOK MINYAK SAWIT PADA AKHIR SEPTEMBER 2,59 JUTA TON

Kinerja industri sawit masih positif hingga akhir September 2025.

Produksi CPO pada bulan September 2025 mencapai 3,93 juta ton, lebih rendah 22,32% dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 5,06 juta ton. Demikian juga yang terjadi pada produksi minyak inti sawit (PKO) yang mencapai 366 ribu ton atau lebih rendah dibanding produksi Agustus 2025 sebesar 481 ribu ton. Jika dilihat dari *year on year* hingga September 2025, kinerja CPO menunjukkan gestur positif dengan produksi CPO dan PKO tahun 2025 mencapai 43,3 juta ton, lebih tinggi 11,30% dibandingkan produksi tahun 2024 sebesar 38,9 juta ton.

Dalam laporan tertulis yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono pada 27 November 2025, konsumsi dalam negeri juga turun dari 2,10 juta ton pada Agustus 2025 menjadi 2,05 juta ton pada September 2025. Penurunan terbesar terjadi pada konsumsi



biodiesel dari 1,11 juta ton pada Agustus 2025 menjadi 1,07 juta ton. Penurunan juga terjadi pada konsumsi pangan dari 806 ribu ton pada Agustus 2025 menjadi 793 ribu ton pada September 2025. Kenaikan konsumsi hanya terjadi pada oleokimia sebesar 3,83% dari 183 ribu ton menjadi 190 ribu ton.

Menurut Mukti Sardjono, pada bulan September 2025, total ekspor produk sawit mencapai 2,20 juta ton, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 3,47 juta ton.

Penurunan ekspor terbesar terjadi pada minyak sawit olahan dari 2,34 juta ton menjadi 1,57 juta ton yang diikuti penurunan ekspor CPO dari 494 ribu ton menjadi 91 ribu ton. Sedangkan ekspor oleokimia juga anjlok dari 199 ribu ton menjadi 93 ribu ton.

Pada bulan September, kuantitas

ekspor ke beberapa negara mengalami penurunan dibandingkan pada bulan sebelumnya antara lain India 409 ribu ton, China 212 ribu ton, Malaysia 144 ribu ton, Afrika 143 ribu ton, Pakistan 123 ribu ton, USA turun 73 ribu ton, Uni Eropa turun 50 ribu ton. Negara tujuan lainnya seperti Bangladesh juga turun 26 ribu ton, dan Timur Tengah turun 24 ribu ton. Kenaikan ekspor terjadi untuk tujuan Rusia sebesar 18 ribu ton.

Dengan ekspor sebesar itu, nilai ekspor sawit pada September 2025 mengalami penurunan dari USD 3,819 miliar pada Agustus 2025 menjadi 2,528 miliar. Namun, jika dilihat secara *year on year* sampai September 2025, kinerja ekspor meningkat dengan nilai ekspor 2025 mencapai USD 27,31 miliar, lebih tinggi 39,85% dari ekspor tahun 2024 sebesar USD 19,530 miliar. Secara *year on year*, total volume ekspor hingga September 2025 sebesar 24,896 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan September 2024 sebesar 21,94 juta ton.

Peningkatan nilai ekspor karena harga rata-rata Januari-September tahun 2025 mencapai USD 1.210/ton Cif Rotterdam yang lebih tinggi dari rata-rata Januari-September 2024 sebesar USD 1.020/ton Cif Rotterdam.

Menurut Mukti Sardjono, dengan stok awal 2,54 juta ton, penurunan produksi, konsumsi, dan ekspor selama September membuat stok akhir bulan masih meningkat tipis menjadi 2,59 juta ton. ■



GAPKI APRESIASI INOVASI ITS DI SEKTOR SAWIT



ITS termasuk salah satu perguruan tinggi yang aktif melakukan inovasi di bidang sawit.

GAPKI memberikan apresiasi kepada Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) atas berbagai inovasi yang dikembangkan di bidang kelapa sawit. Apresiasi ini disampaikan oleh Bendahara Umum GAPKI Mona Surya dan Komp. Perguruan Tinggi GAPKI, Tirza Samola pada kunjungan khusus ke Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) ITS di Surabaya pada 22 Oktober 2025. ITS mengundang GAPKI untuk memperkenalkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan hilirisasi industri sawit.

Inovasi dan hasil riset ITS yang berhubungan dengan kelapa sawit dipamerkan di Aula Galeri Riset dan Inovasi Teknologi (GRIT) di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya. Beberapa inovasi telah dipublikasikan dan dikenal masyarakat. Salah satu inovasi yang mendapatkan perhatian khusus adalah inovasi digital untuk mendeteksi penyakit Ganoderma. Penyakit mematikan ini sering menyerang tanaman sawit berusia tua. Teknologi ini dinilai berpotensi besar membantu petani dan perusahaan dalam menjaga produktivitas kebun sawit di Indonesia.

"GAPKI menyambut baik langkah ITS mengembangkan inovasi untuk mendukung sektor kelapa sawit

nasional. GAPKI sangat mendukung upaya kolaborasi riset dengan perguruan tinggi," kata Mona Surya. Kampus kebanggaan masyarakat Surabaya dan Jawa Timur ini salah satu perguruan tinggi yang aktif dalam penelitian di industri sawit. Para peneliti ITS banyak yang mendapatkan dukungan BPDP melalui program Grant Riset Sawit. Bahkan pada tahun ini, enam orang peneliti ITS lolos tahap presentasi Grant Riset Sawit 2025.

ITS termasuk salah satu perguruan tinggi yang aktif melakukan inovasi di bidang sawit dan telah menerima pendanaan penelitian dari BPDP.

Selain teknologi untuk deteksi penyakit Ganoderma, ITS juga mengembangkan sejumlah teknologi lain yang mendukung sektor sawit, termasuk riset terkait efisiensi proses panen dan pengolahan hasil sawit. GAPKI berharap hasil riset tersebut dapat diterapkan oleh perusahaan sawit skala besar dan kecil.

Menurut Mona Surya, kolaborasi perguruan tinggi dan industri sangat penting dalam rangka mendukung pertumbuhan industri. Apalagi industri yang membutuhkan riset berkelanjutan dan inovasi untuk mendukung program hilirisasi maupun *sustainability* sektor sawit. "Kami berharap ITS dapat menjalin kerja sama lebih erat dengan dunia industri, agar hasil riset dan penelitiannya benar-benar bisa diterapkan di lapangan," katanya.

Dalam kunjungan GAPKI ini juga dilakukan diskusi tentang berbagai hal yang terkait dengan inovasi di sektor sawit. Diskusi ini dihadiri oleh Direktur DRPM Fadlilatul Taufany dan para peneliti sawit dari ITS serta perwakilan BPDP. Beberapa peneliti yang hadir di antaranya merupakan mentor peserta Hackathon Sawit Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh GAPKI bersama BPDP. Dari pertemuan ini, para peneliti ITS semakin memahami kebutuhan industri secara lebih mendalam dan spesifik sebagai bahan riset mendatang. ■



ANTISIPASI IMPLEMENTASI MANDATORY B50



B50 akan diterapkan secara bertahap dan terukur dengan prinsip *clear and clean*.

Industri kelapa sawit nasional akan memasuki momentum penting pada tahun 2026 yang akan datang tidak lama lagi. Momentum ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempercepat implementasi B40 menjadi B50 tahun depan. Rencana ini sudah diumumkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 9 Oktober 2025. "Sudah diputuskan bahwa 2026, insya Allah kita akan dorong ke B50," katanya. Kebijakan ini dinilai strategis untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Percepatan mandatory B40 menjadi B50 tentu membutuhkan tambahan bahan baku yakni minyak sawit. Dalam kondisi produksi sawit stagnan, bahkan cenderung turun dalam lima tahun ini, program B50 menjadi tantangan besar. Berbagai faktor perlu dipertimbangkan sehingga kebijakan ini manfaatnya maksimal untuk seluruh sektor. Konsumsi dalam negeri terpenuhi, daya saing sawit terjaga, volume ekspor memadai, dan transisi energi sebagai program besar pemerintah juga terealisasi.

"Pemerintah masih mengkaji sejumlah aspek teknis, ekonomi, hingga kesiapan industri sebelum menetapkan skenario final," kata



Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiyani Dewi dalam konferensi *21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook* di Bali pada 13 November 2025. Kajian ini juga mencakup perhitungan harga pokok produksi (HPP) dan harga indeks pasar (HIP).

Menurut Eniya, saat ini pemerintah memberikan biosolar bersubsidi kepada pengguna yang menjalankan PSO. Sedangkan biosolar non-PSO mengikuti mekanisme pasar. Penurunan kadar campuran biodiesel di segmen non-subsidi diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan baku untuk program B50 di sektor subsidi. "Produktivitas CPO tahun depan tidak

tumbuh signifikan. Kalau B50 mau diterapkan harus ada penyesuaian," katanya.

Program biodiesel bertujuan menjaga harga sawit, menekan emisi karbon, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kebijakan ini perlu menyesuaikan kapasitas industri dan pasokan bahan baku.

"Kalau untuk B50 harus membuka lahan dua juta hektare, itu tidak mungkin dilakukan cepat. Kebijakan akan disesuaikan dengan *supply, volume, dan harga*," katanya. Karena itu, B50 akan diterapkan secara bertahap dan terukur dengan prinsip *clear and clean*, termasuk kesiapan pemangku kepentingan dari hulu hingga pengguna akhir.

**JULIAN CONWAY MCGILL**

Managing Director
Glenauk Economics

Kesiapan pemangku kepentingan dan dampak program B50 juga disampaikan Tim Peneliti Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI). “Pertimbangkan kapasitas produksi sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani,” kata Dr. Surjadi, peneliti Pranata UI dalam FGD bertajuk *Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia* di Jakarta pada 17 Oktober 2025.

Berdasarkan kajian Pranata UI, mandatory B50 menuntut produksi sawit hingga 59 juta ton per tahun. Padahal produksi sawit dalam lima tahun ini sekitar 50-52 juta ton. Produksi sawit tahun 2025 diperkirakan hanya 48,2 juta ton yang dihasilkan dari 16,8 juta hektar kebun sawit. Artinya masih ada gap antara pasokan dan permintaan. Selain itu, kebijakan B50 juga membutuhkan tambahan subsidi Rp 46,45 triliun atau naik Rp 10-12 triliun dari anggaran subsidi sebelumnya.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah devisa. Kebijakan B50 memang menghemat devisa impor solar Rp 172,35 triliun. Tapi, ekspor CPO berpotensi tertekan Rp 190,5 triliun yang berdampak pada penurunan surplus neraca perdagangan, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah. Penurunan ekspor CPO juga dikhawatirkan berdampak pada program-program BPDP, terutama program untuk petani seperti PSR yang menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan produksi sawit.

Menurut Head of Center of Food,

**ATUL CHATURVEDI**

Chairman Asian Palm Oil Alliance
(APOA)

Energy, and Sustainability Development INDEF, Abra Talattov, keberlanjutan transisi energi dan hilirisasi sawit bergantung stabilitas pendanaan. Dibutuhkan desain fiskal yang adaptif seperti diversifikasi sumber insentif atau mekanisme berbagi risiko. Sebab, selisih harga impor solar dan biodiesel dari sawit ditutup dengan subsidi dari BPDP sebesar Rp 46 triliun pada 2021 dan tambahan Rp 16,6 triliun pada 2025 untuk mendukung B40.

Rencana B50 memantik perhatian besar karena implikasinya cukup luas. Tidak heran kalau negara importir CPO Indonesia juga menaruh perhatian. “Kondisi ini menimbulkan fluktuasi harga di pasar regional dan global,” kata Abdul Rasheed Jan Mohammad, CEO Westbury Group sesi diskusi konferensi IPOC 2025 di Bali. India dan Pakistan akan merasakan dampak kebijakan ini. Begitu juga pasar minyak sawit global karena posisi Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit dunia.

Chairman Asian Palm Oil Alliance (APOA) Atul Chaturvedi mengatakan India harus mencari strategi baru untuk menjaga kontinuitas pasokan sawitnya dalam jangka panjang. “India harus mengurangi ketergantungan impor untuk menjaga ketahanan pasokan minyak nabati,” kata Atul dalam konferensi IPOC 2025. Tahun ini, India mengimpor 8,25 juta ton CPO, 53% di antaranya berasal dari Indonesia. Sisanya dari Malaysia dan Thailand.

Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill mengatakan negara-negara konsumen minyak nabati sangat sensitif dengan

**M. FAHDIL HASAN**

Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI

harga. Terutama India dan Pakistan. Faktor ini perlu diantisipasi oleh Indonesia jika B50 dijalankan. “Potensi mereka beralih ke minyak nabati lain semakin terbuka,” katanya. Di China dan Eropa, minyak sawit mulai mendapat pesaing serius yakni minyak kedelai. “Pasokan besar minyak kedelai dan regulasi menjadi tantangan besar CPO,” katanya.

Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan mengatakan penerapan B50 harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; bukan hanya sebatas kebijakan swasembada energi. “Kita menyarankan kalau mau sampai B50, harus dipastikan dahulu pasokan CPO tersedia,” katanya. Sebab, produksi sawit dalam lima tahun ini stagnan. Padahal selain untuk biodiesel, industri sawit juga harus memenuhi kebutuhan pangan dan ekspor.

Menurut Fadhil Hasan, aspek teknis kebijakan B50 perlu kajian komprehensif, terutama terkait kemampuan industri otomotif dalam mengakomodasi peningkatan kadar biodiesel. Karena itu, Indef menyarankan kebijakan B40 atau B45 dipertahankan hingga 3-4 tahun ke depan sembari meningkatkan produksi CPO melalui percepatan program peremajaan kebun sawit dan peningkatan produktivitas. Langkah ini dinilai sebagai solusi ketika B50 dijalankan, volume ekspor tidak berkurang dan konsumsi dalam negeri tetap tinggi. ■

B50 PERLU KEBIJAKAN YANG ADAPTIF DAN FLEKSIBEL

“Ini seperti kebijakan campuran gula-etanol di Brasil,” katanya.

“Dulu B10 saja dianggap mustahil. Sekarang, B40 sudah berjalan. Itu pencapaian luar biasa.” Sepenggal kalimat itu muncul dari Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill yang mengapresiasi langkah Indonesia dengan *mandatory* campuran minyak nabati pada solar dalam konferensi *21st Indonesian Palm Oil Conference 2025 and 2026 Price Outlook* di Bali pada 14 November 2025. Apalagi pemerintah Indonesia siap meningkatkan campuran minyak nabati dari 40% menjadi 50% pada 2026.

Meski demikian, McGill mengingatkan kebijakan B50 dapat dijalankan dengan pendekatan adaptif karena kapasitas produksi biodiesel domestik belum sepenuhnya siap mendukung pencampuran B50. Selain itu, produksi sawit nasional perlu ditingkatkan untuk memenuhi 59 juta ton kebutuhan program B50. Karena itu, pendekatan adaptif dengan mekanisme *mandatory* yang fleksibel bisa menjadi pilihan. “Ini seperti kebijakan campuran gula-etanol di Brasil,” katanya.

Kapasitas produksi sawit nasional menjadi perhatian besar untuk penerapan B50. Guru Besar IPB University, Bayu Krisnamurthi mengatakan kebijakan B50 harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan matang. Sebab, produksi sawit dalam dua tahun ini stagnan. Begitu juga investasi di sektor sawit karena kebijakan yang tumpang tindih. Tidak heran jika daya saing sawit mulai

menurun dibandingkan minyak nabati lainnya. Banyak negara konsumen yang beralih dari sawit. “Jangan sampai B50 jadi genta kematian industri sawit,” katanya.

Dalam kajian Pranata UI disebutkan penerapan *mandatory* B50 pada 2026 dapat memicu ketidakseimbangan serius dalam industri sawit nasional. Dengan kebutuhan bahan baku mencapai 59 juta ton per tahun untuk B50, industri sawit Indonesia menghadapi ancaman defisit pasokan, tekanan ekspor, serta gejolak harga yang berdampak langsung pada daya saing global dan kesejahteraan petani. *Mandatory* B35-B40 dinilai yang paling optimal karena manfaat energi, ekspor, dan stabilitas harga masih seimbang.

Untuk mencapai keseimbangan dalam *mandatory* B50, Pranata UI mengatakan pentingnya peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam menjaga alokasi dana antara subsidi biodiesel, program PSR, dan stabilisasi harga minyak goreng.

“Proporsi pendanaan yang terlalu besar untuk subsidi energi dapat mengurangi dukungan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani,” kata Surjadi, peneliti Pranata UI. B50 membutuhkan tambahan subsidi hingga Rp 46,45 triliun, naik Rp 10-12 triliun dibandingkan

sebelumnya.

Menurut Julian Conway McGill, Indonesia dapat mengatur volume serapan biodiesel berdasarkan naik turunnya harga minyak sawit mentah dan solar. Ketika harga sawit tinggi, penggunaan biodiesel dikurangi. Begitu juga sebaliknya ketika harga sawit rendah, serapan untuk biodiesel diperbesar.

Waktu implementasi *mandatory* merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan program B50. Dia menilai keberhasilan B50 tidak semata dipandang dari tingginya kadar campuran, namun juga oleh keseimbangan antara aspek energi, fiskal, industri, dan dinamika pasar global.

Transisi energi dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan berkelanjutan memang harus dilakukan. Apalagi Indonesia mencanangkan kemandirian energi. Karena itu, waktu yang tepat dalam implementasi B50 merupakan faktor kunci menjaga keseimbangan industri sawit yang mencakup semua sektor yang saling berkaitan. ■



MEMBANGUN RELASI, MEMPERKUAT KOMUNIKASI

Industri sawit harus sama-sama dijaga dari kampanye negatif yang tidak berdasarkan fakta.

Membangun relasi yang kokoh dengan dunia pers merupakan elemen penting dalam menjaga dan meningkatkan komunikasi industri kelapa sawit. Dengan komunikasi yang terstruktur dan sistematis, publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang tentang industri sawit sekaligus menegaskan citra positif industri. Karena itu, penguatan relasi dengan industri media terus dilakukan oleh GAPKI sebagai bagian dari strategi komunikasinya.

Sebagai bukti penguatan silaturahmi dengan media, GAPKI menghadiri *Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030* di Monumen Pers Nasional di Solo pada 4 Oktober 2025. GAPKI diwakili oleh Ketua Umum Eddy Martono, Sekjen M. Hadi Sugeng, Kabid. Komunikasi Bandung Sahari, dan Komp. Media Sosial Indah Permata Soegyarto. Dalam kegiatan PWI Pusat ini, pengurus GAPKI juga berdialog dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fify Aleyda Yahya.

Dalam dialog ini Menteri Meutya Hafid mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin antara GAPKI dan PWI Pusat. Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung komunikasi industri sawit dalam memberikan edukasi dan informasi positif kepada masyarakat. Sebagai industri yang berkontribusi

besar kepada negara, industri sawit harus sama-sama dijaga dari disinformasi dan kampanye negatif yang tidak berdasarkan fakta. Karena itu, secara khusus Menteri Meutya Hafid mendorong GAPKI untuk terus membersamai PWI.

Apresiasi kepada GAPKI juga disampaikan oleh Ketua Umum PWI Pusat Masa Bakti 2025-2040, Akhmad Munir. Dalam sambutan pengukuhan Akhmad Munir menjelaskan bahwa selama ini GAPKI berkontribusi dalam perkembangan PWI melalui programnya antara lain peningkatan kompetensi wartawan. Bahkan, GAPKI juga selalu menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh PWI. "Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan GAPKI selama ini," katanya.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyambut positif langkah PWI Pusat untuk melanjutkan kerjasamanya. "PWI adalah mitra strategis untuk menyampaikan informasi tentang industri sawit yang akurat dan berimbang," katanya saat menyambut kunjungan Pengurus PWI Pusat ke Kantor GAPKI pada 10 Oktober 2025. Pengurus PWI Pusat yang hadir antara lain Ketua Umum Akhmad Munir, Sekjen Zulmansyah, dan Kabid Kerjasama Ariawan serta pengurus lainnya.

Eddy Martono menegaskan GAPKI selalu terbuka untuk memperkuat kemitraan dengan dunia pers. Karena



itu, kunjungan PWI Pusat merupakan momentum penting memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan kedua pihak dalam membangun sinergi antara dunia industri dan pers nasional. Program kerjasama yang berjalan sejak tahun 2024 antara lain pelatihan jurnalistik dan *workshop* peningkatan wawasan dan kompetensi wartawan tentang industri kelapa sawit serta hilirisasi sawit.

Menurut Ketua Umum GAPKI, peran pers sangat penting dalam menjaga kondusivitas industri sawit nasional. Pemberitaan yang akurat dan berimbang merupakan edukasi positif masyarakat supaya tidak mudah terjebak kampanye negatif sawit yang selama ini banyak dikemas dengan berbagai isu seperti kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan. Informasi yang akurat adalah bagian dari proses membangun kepercayaan publik kepada industri. ■



TIGA TANTANGAN INDUSTRI SAWIT MASA DEPAN



GAPKI merumuskan strategi yang dikemas dalam tema IPOC 2025 yakni Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy and Global Trade.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan perhatian besar pada tiga topik utama dalam upaya menjaga daya saing dan keberlanjutan industri. Tiga topik ini menjadi penekanan yang disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono pada pidato pembukaan 21st *Indonesian Palm Oil Conference & 2026 Price Outlook* di Nusa Dua, Bali, 13 November 2025. IPOC tahun ini dihadiri oleh 1.545 peserta dari 28 negara, didukung oleh 38 sponsor baru dan 113 booth terisi penuh oleh pameran inovasi di sektor sawit.

Tiga topik prioritas itu adalah dinamika lanskap perdagangan global, penguatan tata kelola industri sawit, dan kebijakan bauran energi. Dinamika lanskap perdagangan global meliputi perubahan kebijakan negara mitra, regulasi berkelanjutan, dan isu geopolitik menjadi faktor yang dapat mempengaruhi permintaan

dan hambatan pasar. Penguatan tata kelola industri sawit terkait sertifikasi ISPO sebagai kunci keberlanjutan. "ISPO bukan sekadar simbol. Ini produk kedaulatan bangsa dan harus menjadi standar emas global," katanya.

Sedangkan kebijakan bauran energi terkait keputusan pemerintah mempercepat penerapan B50 mulai tahun 2026. Kebijakan ini mendapatkan perhatian luas karena memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap pasar minyak sawit domestik dan global, daya saing sawit ke depan, hingga stabilitas pasar sawit. GAPKI merumuskan strategi yang dikemas dalam tema utama IPOC 2025 yakni *Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy and Global Trade*.

Menurut Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, industri sawit memiliki peluang pertumbuhan cukup lebar

sejalan dengan tercapainya *Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU CEPA) yang mengubah percaturan dan akses langsung ke pasar terbesar di dunia. Namun, kebijakan EUDR mengharuskan pelaku industri sawit lebih strategis, patuh dan menunjukkan komitmen atas aspek keberlanjutan. "EUDR harus kita pandang sebagai cermin bagi sistem yang harus dibangun dan diterapkan pada industri sawit kita," katanya.

Karena itu, sertifikasi ISPO harus diperkuat sebagai produk kebanggaan nasional dan bukti kedaulatan yang harus menjadi standar emas global. Pemahaman hingga penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan bukan hanya slogan. "Sustainability adalah komitmen GAPKI," ujarnya. Di sisi lainnya, GAPKI mengapresiasi kebijakan



pemerintah tentang biofuel. Kebijakan energi terbarukan dari minyak sawit menciptakan dasar permintaan domestik dan berdampak bagi pengurangan emisi, serta memberi harapan bagi para petani sawit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutan IPOC 2025 secara virtual menegaskan minyak sawit salah satu pilar ekonomi terpenting Indonesia yang berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Komoditas sawit menjaga surplus neraca perdagangan nasional hingga USD 4,34 miliar pada September 2025. Selama Januari-September 2025, ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 28,66 juta ton, naik 11,26 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Minyak sawit terus memainkan peran kunci sebagai sumber pendapatan, energi, inovasi, dan kekuatan nasional. Kita tidak boleh berhenti pada ekspor bahan mentah,” katanya. Pemerintah terus mendorong hilirisasi industri sawit untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy dalam sambutan IPOC 2025. “Sektor sawit menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” katanya. Sawit bukan komoditas, namun fondasi strategis pembangunan nasional. “Sawit adalah jembatan persahabatan, perdamaian, dan kemanusiaan,” katanya.

Karena itu, sukses Indonesia tidak hanya diukur dari produksi saja, tetapi juga kemampuan mengelola secara bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kompas moral pembangunan modern. Sawit berkontribusi langsung terhadap SDGs. “Indonesia berkomitmen pertumbuhan ekonomi tidak merusak alam dan tidak meninggalkan generasi mendatang,” katanya.

Menurutnya, fondasi tata kelola sawit Indonesia terinspirasi oleh filosofi kearifan lokal Bali yakni, Tri Hita Karana yang berarti harmoni antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), harmoni antarmanusia (*Pawongan*),



harmonis dengan alam (*Palemahan*). Nilai ini dipandang relevan sebagai landasan global untuk membangun industri sawit yang inklusif, etis, dan berkeadilan. Karena itu, Indonesia tidak tinggal diam menghadapi diskriminasi, kampanye hitam, dan hambatan dagang terhadap sawit.

Pengelolaan sawit yang inklusif telah menjadi tuntutan global. Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan mengatakan China mengalami perubahan struktur permintaan. Perusahaan di negeri ini semakin mendorong penggunaan minyak sawit bersertifikat, terutama RSPO, meskipun belum menjadi aturan wajib pemerintah.

Perubahan preferensi ini dipicu tuntutan rantai pasok global dan kesadaran terhadap produk ramah lingkungan. Sertifikasi ISPO diharapkan dapat memperkuat hubungan dagang Indonesia-China.

Topik perdagangan global, tata kelola sawit dan keberlanjutan mendominasi pembahasan IPOC 2025. Selain Menko Perekonomian dan Kepala Bappenas, pembicara kunci yang dihadirkan di IPOC 2025 antara lain Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno. Adapun pembicara utama Thomas Mielke (Executive Director Oil World), Julian McGill (Glenauk Economics), Ryan Chen (Cargill Investments, China), Satia Varqa (FastMarkets), Budi Mulyanto

(Kepala Pusat Studi Sawit IPB), dan lain-lainnya.

Konferensi minyak sawit kelas dunia ini bukan hanya sukses dari aspek penyelenggaraan, namun juga panduan bagi pelaku industri. “Antusiasme untuk acara tahun ini sungguh luar biasa,” kata Ketua Panitia IPOC ke-21, Mona Surya. Apalagi IPOC 2025 mencetak sejarah dan rekor dari sisi peserta dan negara asal peserta.

Hal ini menunjukkan posisi Indonesia sebagai pusat diskusi global seputar masa depan minyak sawit dan energi terbarukan. IPOC 2025 menegaskan perannya sebagai konferensi komoditas paling berpengaruh di dunia. ■



TAHUN 2026, HARGA MINYAK SAWIT TETAP TINGGI

Tekanan terhadap industri ini justru membuka peluang untuk rebound kuat.

Harga minyak sawit mentah diperkirakan tetap tinggi pada tahun 2026 yang didukung oleh sejumlah faktor. Selain produksi melambat, permintaan biodiesel meningkat dan potensi pengetatan ekspor sebagai pemicunya. Sinyal penguatan harga dimulai kuartal pertama 2026. "Harga akan berada pada kisaran US\$ 1.050 hingga US\$ 1.125 per ton," kata Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Fadhil dalam *21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook* di Nusa Dua, Bali pada 14 November 2025.

Berdasarkan proyeksi ke depan, produksi CPO dan PKO menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun, tren ke depan mengindikasikan pertumbuhan yang lebih moderat. "Ini yang menjadi faktor memperkuat harga di pasar global," katanya. Kinerja ekspor diprediksi meningkat 15% yang sejalan dengan permintaan global. Sedangkan konsumsi dalam negeri



tumbuh 4,5% yang didorong oleh industri pangan dan penerapan B50 mulai tahun 2026.

Menurut Fadhil Hasan, *mandatory* biodiesel Indonesia menjadi penggerak utama perubahan struktur permintaan. Penerapan B40 pada 2025 menyerap 15,6 juta kiloliter biodiesel atau setara 14 juta ton CPO. Setiap kenaikan campuran minyak nabati pada solar menyerap lebih banyak CPO dalam negeri, mengurangi ketersediaan ekspor dan tetap menopang harga. Karena itu, harga minyak sawit tahun 2026 diperkirakan tetap tinggi.

Analisis senior Godrej International Ltd. Dorab Mistry mengatakan harga sawit akan tetap tinggi pada 2026. Tekanan terhadap industri ini justru membuka peluang untuk *rebound* kuat. Titik balik harga terjadi ketika produksi mulai menurun di akhir tahun. Periode Januari-Maret adalah fase yang sangat bullish bagi pasar minyak sawit.

"Kenaikan hingga RM 5.500 sangat mungkin terjadi," katanya. Apalagi jika Indonesia menyesuaikan kebijakan DMO yang dapat memperketat pasokan dan mendorong harga lebih tinggi.

Menurut Dorab Mistry, posisi Indonesia sangat menentukan harga

global. Jika pemerintah membatasi ekspor dengan menyesuaikan DMO, maka harga berjangka minyak sawit akan meroket. Rencana implementasi B50 juga menambah dukungan terhadap harga. Selain itu, dinamika harga minyak bunga matahari juga berperan.

Dia memperkirakan harga minyak bunga matahari kompetitif kembali pada pertengahan 2026. "Tetapi hanya setelah minyak bunga matahari kehilangan pangsa pasar yang signifikan, terutama di India," katanya.

Sementara itu, Executive Director, ISTA Mielke GmbH (Oil World) Thomas Mielke menilai rencana B50 akan memicu kenaikan harga minyak sawit secara drastis karena produksi nasional belum mencukupi kebutuhan tambahan bahan baku biodiesel. Secara konsep B50 merupakan kebijakan yang baik. Namun, Mielke menilai keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada ketersediaan pasokan minyak sawit yang memadai.

"Anda membutuhkan sekitar 2,2 juta ton minyak sawit, mungkin sedikit lebih banyak untuk B50, yang pada saat ini tidak sesuai dengan volume produksi Indonesia," katanya.

Dampak kenaikan harga minyak sawit global akan merembet ke pasar domestik. "Ini bisa menjadi hambatan pemerintah menjaga harga domestik tetap wajar bagi konsumen," katanya. ■

PENGENDALIAN KARHUTLA TIDAK BISA PARSIAL

“Kami sepakat membentuk Tim Koordinasi Bersama Pengendalian Karhutla APhi-GAPKI di tingkat pusat.”

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu menjadi ancaman serius, terutama pada musim kemarau panjang. Potensi ancamannya tidak hanya masyarakat di sekitar hutan, tetapi juga wilayah yang lebih luas. “Pengendalian karhutla tidak bisa parsial, harus lintas sektor,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono setelah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APhi), Soewarso di Jakarta pada 16 Oktober 2025. Penandatanganan ini disaksikan oleh perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian.

Kerjasama berdurasi tiga tahun ini dilakukan melalui pembinaan masyarakat, terutama yang menghuni kawasan sekitar hutan sebagai kelompok terdekat dengan hutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan pilihan bijak karena mereka yang sehari-hari hidup dan beraktivitas di sekitar hutan. Apa yang terjadi di hutan, mereka yang menerima risiko paling awal dan mungkin juga paling besar. Karena itu, pengendalian karhutla berbasis pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menekan risiko, bahkan ancaman karhutla.

Menurut Eddy Martono, pada usaha berbasis lahan, ada banyak irisan dalam tata kelola pengendalian karhutla yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Kolaborasi dengan banyak pihak menjadi kunci penting pengendalian karhutla.



Kolaborasi dunia usaha, pemerintah, masyarakat, dan sektor yang lainnya akan memberikan dampak besar dalam pengendalian risiko dan ancaman karhutla. “Kami sepakat membentuk Tim Koordinasi Bersama Pengendalian Karhutla APhi-GAPKI di tingkat pusat,” katanya.

Tim koordinasi di tingkat pusat akan menyusun rencana kerja tahunan dan menentukan wilayah prioritas rawan karhutla. Beberapa program sosialisasi, pelatihan, hingga patroli lapangan dikoordinasikan bersama tim di masing-masing wilayah. “Ini program konkret untuk menjalankan kerjasama ini,” katanya. Pada tahun 2025, GAPKI sudah memetakan provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara sebagai daerah rawan karhutla.

Pemetaan daerah rawan karhutla itu dilakukan pada Mei 2025 untuk mengantisipasi risiko karhutla pada puncak kemarau di bulan Agustus 2025 sesuai perkiraan BMKG. Sebanyak 752 perusahaan anggota GAPKI di 15 provinsi telah menerapkan standar dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Pendekatan bersifat kolaboratif ini berbasis lanskap, melibatkan perusahaan, instansi pemerintah, serta komunitas seperti Masyarakat Peduli Api (MPA).

Ketua APhi Soewarso menyambut positif kerjasama dengan

GAPKI. “Pembinaan masyarakat menjadi kunci dalam upaya pencegahan karhutla yang efektif,” katanya.

Melalui kolaborasi ini, APhi ingin memastikan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan perkebunan memiliki kapasitas serta insentif menjaga lingkungan tanpa harus membakar lahan. APhi dan GAPKI berkomitmen mengembangkan modul pembinaan masyarakat kehutanan dan menyediakan sarana-prasarana pendukung untuk pengendalian karhutla. ■

RUANG LINGKUP KERJASAMA GAPKI-APHI

- Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat sekitar hutan dan perkebunan.
- Pengembangan ekonomi alternatif agar masyarakat tidak bergantung pada praktik pembakaran lahan.
- Penguatan program Desa Peduli Api.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- Pemanfaatan teknologi pengendalian kebakaran yang efisien dan ramah lingkungan.



MEMPERKUAT PERAN PEREMPUAN MENUJU SAWIT BERKELANJUTAN

Program ini memberdayakan 3.500 pekerja perempuan di rantai pasok sawit di Kalimantan Timur.



Pekerja perempuan memiliki peran penting dalam bisnis sawit dan mata rantainya sehingga pemberdayaan mereka berdampak signifikan terhadap industri ini. Apalagi jumlah mereka yang terlibat di industri sawit cukup besar sehingga dampaknya juga signifikan. Karena itu, GAPKI memberikan perhatian besar dan komitmen serius dalam pemberdayaan perempuan. Salah satunya dengan mendukung Program POWERRR (Kesetaraan Perempuan dan Kelapa Sawit melalui Sumber Daya, Hak, dan Keterwakilan di Indonesia).

Program POWERRR adalah kolaborasi antara Solidaridad JAGASAWITAN, dan JAPBUSI sebagai sinergi multi-pihak yang berfokus memperkuat peran perempuan di sektor sawit. Program ini bertujuan menciptakan model kerja inklusif yang menjunjung kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan praktik ketenagakerjaan berkeadilan di seluruh rantai pasok industri sawit Indonesia. "GAPKI terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak," kata Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Pengembangan

SDM GAPKI.

Peluncuran Program POWERRR dilakukan di Samarinda pada 23 Oktober 2025. Pada tahap awal program ini akan memberdayakan 3.500 pekerja perempuan di rantai pasok sawit di Kalimantan Timur. Sebanyak 1.500 orang di antaranya adalah petani perempuan dan 2.000 lainnya pekerja di perkebunan.

Mereka menerima pelatihan literasi keuangan dari Syngenta, Solidaridad, Perempuan Mahardika, dan Pusat Studi Gender Universitas Mulawarman. Mereka juga dilatih *Good Agriculture Practices* (GAP) hingga penggunaan bahan kimia yang aman, pengelolaan limbah, serta kebijakan perlindungan anak.

Peluncuran program ini dihadiri para pemangku kepentingan strategis, termasuk perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Perkebunan dari tingkat kabupaten hingga provinsi di Kalimantan Timur. Begitu juga dengan perwakilan GAPKI dan Serikat Pekerja F HUKATAN, 15 perusahaan

sawit, serta organisasi masyarakat sipil. "Inisiatif ini adalah langkah konkret untuk membangun sinergi multipihak," katanya.

Menurut Sumarjono Saragih, serikat pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan di tingkat kebun, bukan sekadar mitra dialog sosial. Melalui program POWERRR semua pihak didorong untuk memperkuat kapasitas serikat agar mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mekanisme perlindungan dari kekerasan di tempat kerja. Peran signifikan pekerja perempuan di sektor sawit merupakan indikator penting penerapan sawit berkelanjutan.

Sumarjono Saragih mengatakan dengan sinergi multipihak, Program POWERRR diharapkan mampu menjadi cetak biru (*blueprint*) bagi transformasi industri sawit di Indonesia menuju arah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan peran perempuan juga memperkuat posisi sawit sebagai komoditas strategis yang ramah terhadap perempuan dan lingkungan. ■



GAPKI PERLUAS PASAR EKSPOR SAWIT KE ANGOLA

Perbedaan kebijakan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memperluas pasar sawitnya.



Peningkatan konsumsi minyak sawit di benua Afrika dari tahun ke tahun mendorong impor minyak sawit semakin meningkat. Dari empat jenis minyak nabati, minyak sawit menjadi pilihan utama dan paling banyak dikonsumsi masyarakat di kawasan Afrika. Potensi pasar ini yang terus dikembangkan oleh GAPKI melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara GAPKI dan *Angola-Indonesia Chamber of Commerce and Industry (AngoNesia)* di arena *Trade Expo Indonesia 2025* di Jakarta pada 18 Oktober 2025.

MoU berdurasi tiga tahun ini ditandatangani oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Cláudio David Pestana Camenha, Presidente AngoNesia. Kerjasama ini mencakup antara lain pertukaran informasi industri sawit, seminar dan promosi bersama untuk menarik investasi serta memperkuat transfer teknologi, fasilitasi perdagangan produk minyak sawit antara Indonesia dan Angola serta penguatan jejaring antar pelaku usaha di kedua negara. "Pasar Afrika punya potensi besar bagi minyak sawit Indonesia," kata Eddy Martono.

Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu pencapaian penting *Trade Expo Indonesia 2025* sebagai ajang pameran dagang

terbesar di Indonesia untuk promosi produk unggulan nasional ke pasar global.

Diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan sawit dinilai memiliki andil besar dalam kesepakatan antara GAPKI dan AngoNesia ini. Kedua belah pihak berkomitmen bekerja sama secara aktif meningkatkan perdagangan dan investasi di bidang minyak sawit.

Sementara itu, Ari Hadiman selaku Kepala Fungsi Ekonomi KBRI Windhoek dengan wilayah akreditasi Angola menegaskan peluang pasar produk sawit Indonesia terbuka luas. Namun, Pemerintah Angola membatasi impor produk olahan sawit dan menerapkan kebijakan pengolahan CPO. Selain itu para pengusaha Angola juga berminat membeli bibit sawit dari Indonesia untuk mengembangkan perkebunan sawit di negaranya. "Jadi ada peluang untuk ekspor bibit sawit," katanya.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal GAPKI, Lolita Bangun, saat ini Indonesia menerapkan kebijakan ekspor produk olahan sawit. Dengan kebijakan ini kapasitas ekspor CPO ke Angola tentu terbatas. Perbedaan kebijakan Indonesia dan Angola ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk memperluas pasar sawit di

luar negeri. Meski demikian, peluang pasar yang terbuka akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi kebutuhan minyak sawit Angola terus meningkat setiap tahun.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh PalmOil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Angola termasuk salah satu dari 10 negara produsen minyak sawit dari benua Afrika. Sembilan negara lainnya adalah Nigeria, Kongo, Ghana, Pantai Gading, Kamerun, Sierra Leone, Guinea, Liberia, dan Senegal. Namun, konsumsi minyak sawit di kawasan ini meningkat yang tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga harus mengimpor dari Malaysia dan Indonesia. ■

INDUSTRI SAWIT DIDORONG PERCEPAT TRANSFORMASI DIGITAL

“Target kita Sulawesi Tengah menjadi pusat sawit berkelanjutan di Indonesia timur.”

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong industri kelapa sawit mempercepat transformasi digital sebagai langkah strategis memperkuat posisi industri di masa depan. “Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan,” kata Gubernur Anwar dalam sambutan pembukaan *Celebes Forum 2025* di Hotel BW Coco, Palu pada 22 Oktober 2025. Sambutan ini dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Fahrudin.

Forum ini mengangkat tema *Menghadapi Tantangan Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di Era Digitalisasi*. Tema ini sesuai kebutuhan industri sawit, terutama yang berkaitan dengan *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, dan *Geospatial Information System (GIS)* untuk memperkuat rantai pasok, transparansi, dan daya saing. Dengan digitalisasi ini Sulawesi Tengah diharapkan menjadi poros sawit berkelanjutan di Indonesia. Apalagi perkebunan sawit besar berdiri di Kabupaten Morowali, Morowali Utara, dan sekitarnya.

Menurut Ketua GAPKI Cabang Sulawesi, Dony Yoga Perdana, selain penerapan digitalisasi di industri sawit, tema utama lain yang dibahas adalah pentingnya sistem sertifikasi, regulasi dan tata kelola industri, serta dukungan pemerintah daerah terhadap industri sawit berkelanjutan. “Yang dibutuhkan industri sawit bukan sekadar berkelanjutan, namun juga kesejahteraan masyarakat,” katanya. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi langkah strategis yang dilakukan GAPKI Sulawesi.

Celebes Forum 2025 sebagai wadah



kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat merumuskan langkah strategis untuk keberlanjutan industri kelapa sawit. Pemateri diskusi dalam forum ini yang berasal dari berbagai kalangan diharapkan memperluas wawasan peserta dalam merumuskan program organisasi. Beberapa pemateri yang hadir antara lain pakar hukum Dr. Sadino, Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta Sri Gunawan, dan lain-lainnya. “Kami ingin forum ini menjadi ruang

bertukar pikiran dan memperkuat sinergi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memberikan apresiasi kepada GAPKI Cabang Sulawesi yang telah mengadakan forum penting ini. Apalagi topik yang dibahas sangat relevan dengan kondisi industri sawit terkini.

“Forum ini diharapkan memperkuat peran industri sawit di Indonesia bagian timur,” katanya. Selama ini industri sawit menjadi salah satu tulang punggung dengan kontribusi devisa ekspor mencapai USD 27,76 miliar pada tahun 2024. Sawit penyumbang devisa terbesar nonmigas.

Empat isu utama yang dibahas yakni digitalisasi, sertifikasi, regulasi dan tata kelola serta peran pemerintah daerah diharapkan melahirkan rumusan penting sebagai pondasi untuk perjalanan organisasi ke depan. Dari forum ini diharapkan lahir kolaborasi pengusaha, akademisi, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan sawit berkelanjutan. “Target kita Sulawesi Tengah menjadi pusat sawit berkelanjutan di Indonesia timur,” katanya. ■



PENETRASI PASAR AFRIKA MELALUI KEMITRAAN DAGANG SAWIT

“Salah satunya adalah penggunaan biofertilizer atau pupuk hayati untuk kesuburan tanah.”

Benua Afrika merupakan kawasan strategis bagi komoditas sawit, terutama produk minyak sawit mentah (CPO). Konsumsi dalam negeri negara-negara di Afrika terus menunjukkan peningkatan. Dari empat jenis minyak nabati yang dikonsumsi masyarakat Afrika, minyak sawit di posisi pertama.

“Afrika juga memiliki nilai historis tentang sawit,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam *business forum bertajuk Opportunities for Trade and Investment Partnerships in Africa* pada *Trade Expo Indonesia (TEI) 2025* di ICE BSD, 18 Oktober 2025.

Afrika, terutama Afrika Barat Daya merupakan tanah leluhur tanaman sawit. Bahkan benua ini pernah menjadi produsen sawit terbesar pada abad ke-18 sebelum digeser Malaysia dan sekarang Indonesia.

“Mayoritas ekspor sawit Indonesia ke Afrika berupa produk olahan,” katanya. Potensi pasarnya cukup besar. Karena itu, GAPKI dan pemerintah Indonesia telah mengembangkan kemitraan dagang. Jangkauan pasarnya terus diperluas, terutama untuk pasar di Afrika Timur dan Selatan seperti Tanzania, Kenya, dan Namibia.

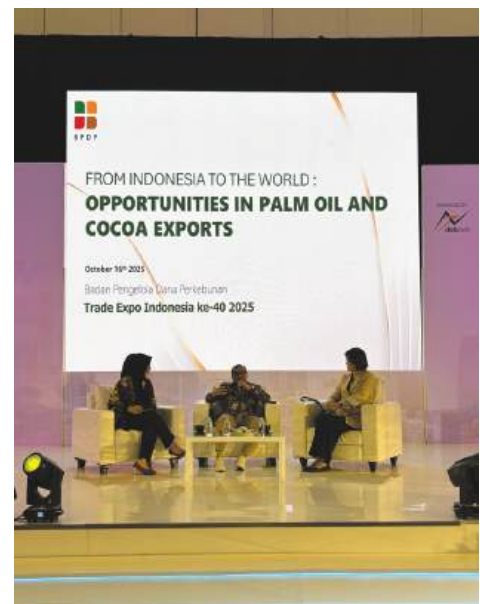
Menurut Eddy Martono, kerjasama Indonesia-Afrika tidak terbatas pada perdagangan, tapi juga penelitian genetik tanaman sawit. Bahkan, pengembangan kumbang penyerbuk juga dilakukan antara Indonesia dan Tanzania. Kemitraan bersama Afrika juga diarahkan untuk pengembangan teknologi, bibit unggul, dan investasi hilirisasi. Yang tidak kalah penting juga adalah mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi

produksi. “Salah satunya adalah penggunaan *biofertilizer* atau pupuk hayati untuk kesuburan tanah,” katanya.

Selain itu, kemitraan Indonesia-Afrika juga diwujudkan dalam pengembangan mekanisasi dan *precision agriculture* untuk menurunkan biaya produksi. Penelitian tentang penyakit busuk pangkal batang akibat jamur *Ganoderma* juga dikembangkan bersama. *Ganoderma* menjadi momok petani sawit karena serangannya bersifat mematikan, membuat batang sawit rapuh dan roboh. “Eksplorasi sumber genetik baru di Afrika untuk mendapat varietas tahan kekeringan dan penyakit juga kita lakukan,” katanya.

Dalam pemeran dagang terbesar di Indonesia ini, pelaku industri kelapa sawit memerkan sejumlah produk andalan, termasuk produk turunan yang dikembangkan UKM berbasis sawit. Pameran yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso ini mengangkat tema *Discover Indonesia's Excellence: Trade Beyond Boundaries.* Menko Pangan mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Pameran yang menghadirkan produk andalan Indonesia ini juga disemarakkan oleh pelaku industri sawit dan organisasinya seperti Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia (APOLIN), Dewan Kakao Indonesia (DEKAINDO), dan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa (HIPKI). Badan Pengelola Badan Perkebunan (BPDP) juga hadir dengan menampilkan dua mitranya yakni Jayanti Batik dan Rumah Tamadun. ■



MEKANISME PERDAGANGAN KARBON HARUS SIMPEL

“Kami usulkan karbon dijual di dalam negeri, bukan melalui bursa,” kata Agam Fatchurrochman.

Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon. Hingga September 2025, total volume transaksi di Bursa Karbon Indonesia sebesar Rp 78,46 miliar. Jumlah ini termasuk kecil apabila dibandingkan dengan potensi sebenarnya. Apalagi Presiden Prabowo menerbitkan Perpres No. 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon pada 10 Oktober 2025. Namun, proses menjual karbon masih rumit dan butuh waktu yang lama untuk *carbon development, monitoring, reporting, dan verification*.

“Perusahaan saja masih susah menjual karbon, apalagi petani,” kata Agam Fatchurrochman, Kompartemen Hubungan *Stakeholders* GAPKI dalam *Workshop on Carbon Trading Mechanism in Indonesian Agriculture* di Semarang pada 7 Oktober 2025. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB). Pembahasan perdagangan karbon difokuskan pada komoditas pertanian yakni padi dan peternakan.

Materi workshop disampaikan oleh Wahyu Marjaka (Direktur Nilai Ekonomi dan Tata Kelola Karbon Kementerian Lingkungan Hidup), Anggri Hervani (Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dan penyusun metodologi GHG pertanian BSIP/BRMP), dan Rizaldi Boer (Konsultan dan Mitra Pembangunan Internasional JICA dan ADB. GAPKI mengusulkan agar mekanisme



perdagangan karbon yang lebih sederhana. “Kami usulkan karbon dijual di dalam negeri, bukan melalui bursa,” kata Agam Fatchurrochman.

Model perdagangan karbon ini menyerupai *Over the Counter* (OTC) dengan tetap didaftarkan di Sistem Registrasi Nasional (SRN) Kementerian Lingkungan Hidup. Kerjasama penjualan karbon bisa dilakukan secara langsung antara pembeli karbon dan penyedia karbon, yakni petani. “Ini terobosan untuk penyederhanaan transaksi karbon,” katanya.

Terobosan ini diharapkan dapat mempermudah perdagangan karbon yang melibatkan petani. “Mustahil petani bisa mengikuti skema perdagangan yang berlaku sekarang,” katanya.

Bagaimana dengan komoditas sawit? Kementerian Pertanian belum menerbitkan metodologi resmi penghitungan *Greenhouse Gas* (GHG). Begitu juga dengan *baseline* yang menjadi basis perhitungannya.

Kalkulator ISPO/RSPO untuk menghitung GHG memang sudah ada dan dipakai. “Tapi, belum ada pengakuan resmi dari Kementan,” katanya. GAPKI sudah melakukan advokasi penggunaan kalkulator ISPO. Kementan diharapkan dapat mengakui kalkulator ISPO sebagai metodologi dalam penghitungan GHG.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, Asdianto mengatakan bahwa padi sawah menjadi salah satu penyumbang utama emisi metana (CH₄). Emisi ini dihasilkan dari dekomposisi bahan organik di lahan tergenang. Penggunaan pupuk nitrogen juga berkontribusi menghasilkan emisi dinitrogen oksida (N₂O) yang memperkuat kontribusi emisi dari sektor ini. Karena itu, pengurangan emisi gas rumah kaca dari lahan pertanian perlu terus didorong untuk mencapai target Net Zero Emission tahun 2060. ■

GAPKI DUKUNG PENGUATAN PETANI SAWIT DI DAERAH 3T

“Menanam sawit adalah jalan kesejahteraan dan menghargai alam,” katanya.

GAPKI mendukung peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui penguatan sumber daya manusia untuk sawit berkelanjutan. Dukungan ini disampaikan Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI, Sumarjono Saragih dalam pertemuan teknis petani sawit bertajuk Pengembangan Sawit untuk Kesejahteraan Masyarakat di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Putussibau, Kalimantan Barat pada 30 Oktober 2025.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) ini dihadiri oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dan Ketua DPRD Kapuas Hulu, Yanto SP dan para petani sawit. Kegiatan ini mempertemukan petani, pemerintah daerah, dan pelaku industri sawit dalam satu ruang dialog terbuka. Di forum ini, GAPKI dipercaya untuk berbagi pengetahuan tentang pembangunan SDM dan keberlanjutan industri sawit.

“Keberlanjutan sektor sawit harus dimulai dari manusianya yakni petani dan pekerja di lapangan,” kata Sumarjono Saragih. Petani dan pekerja lapangan di sektor sawit harus memahami keselamatan kerja, kesehatan, dan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, komoditas sawit bukan hanya masalah benih dan lahan, tapi juga tentang manusia yang



menanam dan mengelolanya. Sawit berkelanjutan tidak hanya tentang hasil panen, namun juga kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan manusianya.

Untuk membangun sawit berkelanjutan, GAPKI mendorong kolaborasi multipihak seperti yang dilakukan di industri kelapa sawit melalui platform JAGA SAWITAN. Sebagai wadah dialog antara pengusaha dan serikat buruh, platform ini memberikan manfaat yang cukup positif bagi banyak pihak. Model kolaboratif ini diharapkan bisa diterapkan di Kapuas Hulu melalui inisiatif baru bernama ISAKU (Inisiatif Sawit Berkelanjutan Kapuas Hulu).

ISAKU bukan hanya menarik dari sisi konsep, namun juga pengucapan. Sekilas seperti kata desaku yang sejalan dengan semangat pembangunan dari desa yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi seperti JAGA SAWITAN dan ISAKU diharapkan

muncul energi besar mendorong sawit yang ramah lingkungan dan

menyejahterakan siapapun yang hidup di sekitarnya. “Menanam sawit adalah jalan kesejahteraan dan menghargai alam,” katanya.

Dengan model kolaborasi JAGA SAWITAN dan ISAKU, Kapuas Hulu berpeluang besar menjadi contoh bahwa sawit bisa tumbuh harmonis bersama alam dan menjaga daerah yang disebut Jantung Borneo tetap hijau dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sektor sawit diharapkan dapat menjadi jembatan bagi peningkatan kesejahteraan dan kelestarian alam di Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki dua taman nasional yakni Betung Kerihun dan Danau Sentarum yang menjadi rumah bagi aneka ragam flora fauna. Sebanyak 56% wilayah Kapuas Hulu adalah kawasan hutan lindung sehingga pembangunan ekonomi harus selaras dengan hati-hati dan selaras dengan kelestarian lingkungan. ■



GAPKI ACEH DIDORONG TINGKATKAN NILAI TAMBAH PRODUK SAWIT



Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pertama di Indonesia berdiri di Aceh tahun 1911.

Industri sawit di Aceh didorong tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. GAPKI Cabang Aceh didorong memelopori peningkatan nilai tambah produk sawit. Dengan luas lahan 565 ribu hektar dan produksi 1 juta ton CPO per tahun, potensi produk turunan kelapa sawit cukup potensial dikembangkan di Bumi Rencong ini. “Peningkatan nilai tambah dapat meningkatkan ekonomi daerah,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam pelantikan Pengurus GAPKI Cabang Aceh 2025-2030 di Banda Aceh pada 8 Oktober 2025.

GAPKI Aceh 2025-2030 dipimpin oleh Azra Husaini yang terpilih dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu) di Banda Aceh, 7 Oktober 2025. Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Aceh, Pengurus GAPKI Pusat, Ketua GAPKI Sumatera Utara, Ketua GAPKI Kalimantan Selatan, Sekretaris GAPKI Sumatera Selatan, dan lainnya. Selain peningkatan nilai tambah, GAPKI juga mendorong pengembangan pelabuhan pelabuhan ekspor di pantai timur dan barat Aceh serta industri hilir produk turunan kelapa sawit.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Ketua Umum GAPKI menegaskan produktivitas kelapa sawit harus

menjadi perhatian serius. Salah satunya dengan mempercepat PSR, sertifikasi ISPO, dan advokasi penyelesaian masalah sawit dalam kawasan hutan. “Yang tidak kalah penting tentunya mematuhi AD/ART dan menjalankan kemitraan dengan pemerintah daerah,” katanya. Langkah ini diharapkan meningkatkan soliditas pengurus GAPKI Aceh dalam menjalankan program kerjanya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Ketua GAPKI Cabang Aceh, Azra Husaini menyatakan siap menjalankan amanah yang telah diberikan oleh 24 anggota GAPKI Aceh. Beberapa program kerja yang telah disiapkan antara lain peningkatan kapasitas dan profesionalisme organisasi agar semakin adaptif terhadap perubahan industri, memperkuat kerjasama dan menjalin komunikasi konstruktif dengan anggota serta pemangku kepentingan, optimalisasi potensi sektor kelapa sawit di Aceh. Pengembangan setiap potensi anggota juga akan dikembangkan.

Azra Husaini menegaskan GAPKI Cabang Aceh harus menjadi wadah yang terbuka, responsif, dan profesional sehingga kehadiran organisasi dapat memberi manfaat nyata bagi seluruh anggota serta



dunia usaha dan masyarakat luas.

“Organisasi harus memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat luas,” katanya. Kehadiran GAPKI di daerah diharapkan semakin memudahkan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

Aceh merupakan daerah bersejarah bagi sawit. Tanaman ini sudah lebih dari 1 abad tumbuh di Aceh. Bahkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pertama di Indonesia berdiri di Aceh tahun 1911. Tepatnya di Sei Liput atau Sungai Liput, salah satu kampung di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Ketika PKS ini berdiri, kebun sawit di Aceh sudah mencapai 2.100 hektar yang dikelola oleh 19 perusahaan di Aceh Tamiang. Perkembangan komoditas sawit cukup positif. Satu dekade kemudian, tahun 1922, luas kebun sawit sudah 6.916 hektar. ■

GAPKI DORONG PENGUATAN SEKTOR HULU INDUSTRI SAWIT

IPOS Forum 2025 mengangkat tema Peran Satgas Sawit dalam Mendukung Industri Sawit Menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mendorong penguatan sektor hulu industri sawit untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Komoditas sawit dengan program hilirisasi menjadi sektor andalan guna merealisasikan visi satu abad kemerdekaan Indonesia dengan target produksi 100 juta ton sawit. "Hilirisasi akan berjalan baik apabila pengelolaan di hulu sudah baik," kata Eddy Martono saat berbicara sebagai pembicara kunci dalam 10th Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS-Forum) 2025 di Medan pada 30 Oktober 2025.

IPOS Forum 2025 yang diadakan oleh GAPKI Cabang Sumatera Utara dengan tema *Peran Satgas Sawit dalam Mendukung Industri Sawit Menuju Indonesia Emas 2045* ini dihadiri oleh 500 pemangku kepentingan industri sawit. Forum ini merupakan ruang aspirasi dan inspirasi serta kolaborasi dan diskusi untuk merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan internal dan eksternal. Salah satu tantangan terbesar sekarang adalah produksi sawit yang stagnan dalam lima tahun terakhir di kisaran 52 juta ton per tahun.



Tantangan industri sawit semakin besar karena di tengah produksi yang stagnan, konsumsi dalam negeri justru meningkat. Kondisi ini akan berdampak serius terhadap ketersediaan minyak sawit global. Apalagi 38% dari total 16,8 juta hektar lahan sawit di Indonesia dimiliki petani yang usianya tua dengan produksi rata-rata 2 ton/hektar per tahun. Sedangkan sawit yang sudah diremajakan rata-rata produksinya 4-8 ton/hektar per tahun. "Peremajaan sawit rakyat harus dipercepat," katanya.

Pemerintah menargetkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 180.000 hektar per tahun. Namun, pada 2024, realisasi PSR hanya 38.247 hektar atau 21% dari target. Akibatnya produksi sawit rakyat menurun. Dana PSR yang disiapkan oleh BPDP dari hasil dana pungutan ekspor sawit terserap 20% setiap tahun. "Padahal

produktivitas sawit rakyat berpengaruh signifikan pada produksi sawit nasional," katanya. Karena itu, sektor hulu industri

sawit harus benar-benar dikelola dengan baik agar hilirisasi dapat berjalan maksimal.

Ketua GAPKI Sumatera Utara, Timbas Prasad Ginting menegaskan PSR harus menyentuh semua aspek yang dibutuhkan petani. "Kalau sawit kami ditebang, kami mau makan apa? Begitu keluhan petani," katanya. Padahal program PSR tidak hanya membiayai peremajaan, namun juga bantuan pertanian tumpang sari supaya petani tetap punya penghasilan sampai sawitnya menghasilkan lagi. "Legalitas kepemilikan lahan, verifikasi lapangan, dan pelaksanaan pekerjaan fisik jadi tantangan lain bagi petani," katanya.

Sementara itu, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Baginda Siagian mengatakan jalan utama meningkatkan produksi sawit nasional dengan PSR," katanya. Selain itu, penggunaan bibit tanpa sertifikat atau bibit asal-asalan menjadi faktor lain rendahnya produktivitas sawit petani. Di tengah lahan yang terbatas, budidaya harus disesuaikan. "Dengan PSR, benih berkualitas dan praktik pertanian yang baik, kita tidak butuh lahan lebih banyak untuk peningkatan produksi," katanya.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan keseimbangan sektor hulu dan hilir perlu diwujudkan bersama agar tujuan masing-masing dapat tercapai secara maksimal. ■



GAPKI SULAWESI SAHKAN 5 PROGRAM KERJA 2026

“Kunci dalam penyelesaian masalah itu koordinasi dan konsolidasi,” katanya.



Beberapa isu krusial di perkebunan sawit menjadi pembahasan penting Rapat Kerja Cabang GAPKI Sulawesi yang mengangkat tema *Rising to the Challenge*. Rakercab yang diadakan di Palu, Sulawesi Tengah pada 21 Oktober 2025 dihadiri oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan pengurus GAPKI Pusat. Rapat dihadiri 14 dari 17 anggota GAPKI Sulawesi untuk mengevaluasi program kerja 2024-2025 sekaligus mengesahkan program kerja 2025-2026. “Rapat ini untuk memperkuat sinergi antaranggota,” kata Ketua GAPKI Cabang Sulawesi, Dony Yoga Perdana.

Beberapa program kerja GAPKI Sulawesi telah ditunaikan antara lain penanganan isu hukum dan ketahanan pangan dengan tumpang sari padi gogo jagung di lahan sawit seluas 62 hektar. Sedangkan kegiatan unggulan antara lain *GAPKI Goes to Campus* di Universitas Tadulako & Universitas Tampusika, FGD perizinan perkebunan dan forum produktivitas sawit di Sulawesi, pelatihan SDM anggota dan *Best Management Practice* petani mitra, *Celebes Forum & Media Gathering*, GAPKI Peduli Bencana Banjir Luwu senilai Rp 125 juta, dan May Day International.

Isu lainnya yang menjadi fokus perhatian GAPKI Sulawesi pada

2025 adalah Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 23 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2025. Perda No. 23 mengatur tata cara pungutan pajak daerah antara lain Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pergub No. 15 mengatur besarnya nilai perolehan air permukaan yang menjadi dasar penghitungan pajak. Perusahaan diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar pajak daerah.

“Regulasi ini perlu disinkronkan dengan regulasi di tingkat pusat,” kata Dony. Sebab, peraturan ini berdampak signifikan terhadap perusahaan, terutama yang berkaitan dengan tarif PAP dan PBB. Selain itu, tumpang tindih peta HGU dan peta ATR/BPN juga menjadi masalah yang perlu dituntaskan. “Kami mendorong perlunya audiensi nasional dengan Kementerian ATR/BPN,” katanya. Masalah ini diharapkan segera selesai untuk memberikan kejelasan dan kenyamanan berusaha bagi perkebunan kelapa sawit di Sulawesi.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengapresiasi program kerja GAPKI Sulawesi yang sudah berjalan dengan baik. Soliditas anggota GAPKI Sulawesi menjadi modal besar menyelesaikan problem yang terjadi di lapangan. Apalagi tantangan yang dihadapi

PROGRAM KERJA GAPKI SULAWESI 2025-2026

- Penguatan Ketahanan Pangan
- Peningkatan Produktivitas Sawit
- Pengembangan SDM dan Regenerasi Tenaga Kerja
- Kolaborasi dan Publikasi Positif
- Konsolidasi dan Tata Kelola Keuangan

industri sawit tidak pernah berhenti dan semakin besar. Karena itu, advokasi kebijakan diharapkan menjadi bagian penting dalam program kerja GAPKI di tingkat pusat dan cabang. “Kita perlu memperkuat sinergi dan soliditas untuk mendukung sawit berkelanjutan,” katanya. Sinkronisasi program kerja dengan kebijakan daerah juga perlu menjadi perhatian.

Sebagai forum strategis, Rakercab GAPKI Sulawesi diharapkan merumuskan arah kebijakan dan rencana kerja yang sejalan dengan program kerja GAPKI Pusat. Sebab, tantangan industri sawit tidak hanya datang dari eksternal, namun juga internal. “Kunci dalam penyelesaian masalah itu koordinasi dan konsolidasi,” katanya. ■



RELASI PERUSAHAAN-PEKERJA SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

“Kita ingin yang sejahtera bukan hanya perusahaan, namun juga pekerjanya.”

Kesejahteraan pekerja merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan perkebunan sawit untuk memaksimalkan setiap potensinya. Peningkatan kesejahteraan menjadi kunci penting yang dibangun melalui hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Untuk mendorong tujuan ini GAPKI Cabang Riau menyelenggarakan *Workshop PADU PERKASA (Peningkatan dan Adaptasi Dunia Usaha untuk Pekerja Sejahtera dan Kesehatan)* di The Zuri Hotel Pekanbaru, pada 28 Oktober 2025.

“Kesejahteraan karyawan itu memberikan rasa aman yang akan mendukung produktivitas,” kata Ketua GAPKI Cabang Riau Lichwan Hartono. *Workshop* ini dihadiri puluhan perusahaan perkebunan di Riau, perwakilan manajemen, bagian SDM, dan serikat pekerja. Tema yang diangkat antara lain manajemen hubungan industrial, perlindungan sosial tenaga kerja, dan hingga implementasi standar keselamatan kerja di perkebunan sawit.

Menurut Lichwan Hartono, kegiatan ini merupakan wadah kolaborasi antarperusahaan dan pemangku kepentingan untuk memperkuat praktik ketenagakerjaan yang sehat, realistis, dan berkelanjutan. Sistem kerja yang adil, transparan, saling menguntungkan merupakan kunci bagi perusahaan untuk membangun hubungan harmonis dengan pekerja. Lichwan kesejahteraan pekerja bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap regulasi, namun juga investasi strategis bagi keberlangsungan bisnis.

Keberlangsungan bisnis sawit sangat penting karena industri sawit bukan sekadar penggerak utama ekonomi daerah, namun juga



tumpuan hidup bagi ribuan tenaga kerja tetap, kontrak, maupun harian lepas. Karena itu, tantangan terkait perlindungan kerja, kepastian upah, dan keselamatan serta kesehatan pekerja perlu mendapat perhatian serius. “Kita ingin yang sejahtera bukan hanya perusahaan, namun juga pekerjanya,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Roni Rahmat mengapresiasi langkah GAPKI Riau menggelar kegiatan ini. *Workshop PADU PERKASA* dapat meningkatkan kepekaan sosial dalam membina hubungan kerja. Sebab, hal-hal kecil di lapangan kadang berdampak besar bila tidak ditangani dengan komunikasi yang baik. Karena itu, sensitivitas pimpinan perusahaan sampai mandor dan petugas di lapangan harus ditingkatkan. “Jangan sampai masalah kecil membesar karena kurangnya empati dan komunikasi,” katanya.

Menurut Roni Rahmat, suasana

kerja yang kondusif dapat tercipta apabila pekerja merasa dihargai dan memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan. Menjaga hubungan industri yang harmonis dan adil sebagai faktor kuncinya. Pekerja yang sejahtera akan menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. “Ini soal membangun rasa saling percaya,” katanya. Apabila rasa saling percaya terbangun, soliditas perusahaan semakin kuat.

Selain sesi materi, *workshop* ini juga menghadirkan studi kasus dan diskusi kelompok untuk menggali strategi penerapan prinsip berkelanjutan di perusahaan peserta. Melalui forum ini, para peserta diajak memahami bagaimana aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat berjalan seimbang dalam operasional perkebunan. “Kegiatan ini bukti komitmen GAPKI Riau mewujudkan hubungan industrial yang sehat dan produktif,” kata Lichwan Hartono. ■

MAHASISWA ITS JUARAI HACKATHON SAWIT NASIONAL 2025

Sektor sawit Indonesia memiliki potensi besar untuk didorong melalui inovasi digital.

Inovasi digital yang dirancang mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) terpilih sebagai pemenang pertama Hackathon Sawit Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh GAPKI yang didukung oleh BPDP. Kompetisi secara daring ini berlangsung sejak Agustus hingga November 2025 dengan tujuan menghasilkan *Minimum Viable Product (MVP)* yang aplikatif bagi sektor sawit. Total 139 tim berpartisipasi dan 118 tim lolos seleksi awal hingga terpilih 4 tim terbaik melalui penjurian ketat yang menilai aspek ekonomi, keberlanjutan, kelayakan teknis, dan skalabilitas.

“Melalui *Hackathon Sawit Nasional 2025*, kita berharap muncul teknologi baru yang memperbaiki tata kelola sawit, dari penerapan AI, sistem digitalisasi, dan model bisnis inovatif,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Mahasiswa ITS yang tergabung dalam Tim BiFlow menyertakan karya RAPIDS: *Inovasi Radar Non Invasif Berbasis Machine Learning untuk Deteksi Dini Ganoderma Boninense pada Kelapa Sawit*. Teknologi ini menghadirkan metode pendeteksian dini tanpa merusak tanaman sehingga petani dapat mengambil langkah mitigasi lebih cepat dan efisien.

Tim BiFlow yang terdiri dari Afan Ghafar Al Hadad, Muhamad Rusydi Al Hakim, Fabiola Tasya Natalia Wijaya, dan Marco Tjandrapurnama ini berhak mendapatkan hadiah Rp75 juta dan sertifikat penghargaan. Kompetisi ini dinilai strategis bagi pengembangan teknologi digital untuk mendukung industri sawit sejalan dengan tema kompetisi yakni *Mengakselerasi Peran Sosial Ekonomi Sawit Melalui Inovasi Digital*. “Masa depan sawit akan sangat cerah dengan dukungan teknologi digital,” kata Eddy Martono.

Hackathon Sawit Nasional 2025 menunjukkan sektor sawit Indonesia memiliki potensi besar untuk didorong melalui inovasi digital. Kompetisi ini berperan sebagai laboratorium ide, mempertemukan industri, kampus, dan mahasiswa untuk bersama-sama membangun masa depan sawit yang lebih berkelanjutan. Industri sawit semakin membutuhkan teknologi pendukung seperti AI, IoT, robotika, dan pemrosesan data dan ajang ini menjadi langkah awal bagi generasi muda Indonesia terlibat langsung dalam transformasi industri sawit. ■



DAFTAR PEMENANG HACKATHON SAWIT NASIONAL 2025

JUARA I

Tim BiFlow (Institut Teknologi 10 November Surabaya)

RAPIDS: Inovasi Radar Non Invasif Berbasis Machine Learning untuk Deteksi Dini Ganoderma Boninense pada Kelapa Sawit.

JUARA II

Tim SawITSmart (Institut Teknologi 10 November Surabaya)

Modernisasi Perkebunan Sawit dengan Robot AI untuk Pemupukan Presisi dan Pemantauan Berkelanjutan.

JUARA III

Tim Jos Sawit (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya)

AI & IoT Portable untuk Monitoring, Pemetaan, dan Prediksi Sawit.

Kategori Khusus Most Disruptive Business Model

Tim Tancap.in (Institut Teknologi Bandung)

TANCAP: Digitalisasi Presisi untuk Produktivitas Sawit Berkelanjutan

